

**Sultan Tidore Zainal Abidin Alting:
Dari Konperensi Denpasar Hingga Menjadi Gubernur Pertama Papua 1946-1956**

Rustam Hasim,¹ Rasty Amalia Faroek²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Khairun Ternate.

2 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate.

rustamhasyim@gmail.com, rastyamalia@gmail.com

Abstrak

Hubungan antara Maluku (Ternate, Bacan dan lebih khususnya lagi Tidore) dengan Papua sudah terjalin jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Hubungan ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan bukan hanya dibuktikan dengan sumber-sumber tertulis. Bahkan cerita-cerita rakyat yang berasal dari Maluku (Kronik Tidore dan Bacan) dan Papua (Kronik Biak) mengkisahkan ikatan persaudaraan itu. Maka tidaklah mengherankan jika ikatan persaudaraan yang akrab antara kedua daerah yang telah berabad-abad menjadi ingatan kolektif tersebut sengaja di hilangkan oleh Kolonial Belanda dengan memisahkan Tidore dengan Papua dalam konferensi Denpasar pada tanggal 7-24 Desember 1946, menimbulkan protes dari Sultan Tidore ke 34 Zainal Abidin Alting.

Konferensi Denpasar yang diprakarsai oleh H.J. van Mook merupakan upaya Belanda mendirikan negara-negara bagian dalam rangka mewujudkan Negara Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Persetujuan Lingarjati. Dalam konferensi ini dibentuklah Negara Indonesia Timur (NIT) meliputi; wilayah Sulawesi, Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara) dan Kepulauan Maluku.

Perjuangan Zainal Abidin Alting dalam memperjuangkan pembebasan Papua (saat itu Irian Barat) bukan hanya semata-mata motivasi politik dan historis melainkan sebagai tanggungjawab seorang pemimpin untuk berjuang membebaskan rakyatnya (Papua) yang dibelenggu oleh penjajah Belanda. Maka pada tanggal 17 Agustus 1956, Presiden Soekarno membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukota Soasiu Tidore, dan melantik Zainal Abidin Alting pada 23 September 1956 sebagai gubernur pertama Papua. Salah satu pasal keputusan Presiden tanggal 16 Agustus 1956 mengatakan pemerintah provinsi bertugas membantu pemerintah pusat dalam perjuangan mengembalikan daerah tersebut dalam kekuasaan de facto Republik Indonesia. Akhirnya melalui perjuangan TRIKORA dan atas kesedian rakyat Papua untuk memilih bergabung dengan Republik Indonesia melalui

Penentuan Pendapar Rakyat (PEPERA) tahun 1969 ke pangkuan Ibu Pertiwi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kata Kunci: Zainal Abidin Alting, Sejarah Politik, dan Papua
Pengantar

Sejarah menunjukkan bahwa Papua merupakan wilayah atau bagian dari Kesultanan Tidore dapat ditemukan dalam berbagai sumber sejarah baik lisan maupun tulisan. Dalam cerita rakyat Tidore mengkisahkan bahwa sejak abad XV Sultan Tidore mengangkat pejabat daerah di Biak dengan gelar Kapitan, Mayor, Sangaji, dan Dimara. Salah seorang tokoh Biak bernama Gurabesi diangkat sebagai pejabat di pusat Istana Tidore dan dinikahkan dengan salah satu putri Sultan. Gurabesi inilah yang kemudian melahirkan penguasa-penguasa di kepulauan Raja Ampat.

Begitu pula dalam catatan tertulis dapat ditemukan dalam mesium kesultanan Tidore, Sinyine Mallige mengemukakan bahwa pada tahun 1453, Ibnu Mansur (Sultan Tidore ke-10) bersama *Sangaji* Patani dan *Kapita* Waigeo melakukan ekspedisi dengan satu armada kora-kora ke Papua. Dari ekspedisi ini berhasil menaklukkan beberapa wilayah di Papua bagian barat seperti wilayah Raja Ampat (*kolano ngaruha*), Papua Gamsio (Sembilan negeri), dan wilayah mafor Soa Raha (empat soa/marga). Wilayah-wilayah inilah kemudian menjadi bagian dari Kesultanan Tidore, hal ini dibuktikan dengan pengangkatan kepala daerah tertentu dengan pangkat dan atribut seperti Kapitan, Mayor, Sangaji, Dimara dan sebagainya. Menurut F.C. Kama bahwa apabila orang Biak datang membayar upeti maka mereka menghadahi sebuah gelar. Gelar yang berasal dari Tidore, seperti sangaji pada masa itu dilakukan oleh Sultan Tidore dengan suatu surat keputusan sultan (*besluit*), di saat yang sama penduduk setempat diwajibkan menyerahkan upeti ke kadaton kesultanan Tidore. (9 Wawan H. Purwanto, 2010).

Fakta tersebut menunjukkan begitu eratnya hubungan Kesultanan Tidore dengan Papua. Bahkan pemberian penggunaan nama Papua menurut cerita lisan berasal dari bahasa Tidore, bahwa kata Papua memiliki beberapa arti. *Pertama*, Papua berarti rambut keriting. *Kedua*, Papua memiliki arti tidak berbapak atau daerah yang tidak bertuan. Dengan diterimanya penggunaan nama Papua oleh masyarakat Indonesia dan sebagai bagian dari wilayah Kesultanan Tidore, maka pada konferensi Malino di Makasar 1946, Frans Kaisepo yang mewakili Papua menentang penggunaan nama Papua dengan mengatakan “*De heer Kasiepo ziede, dat. De band van het landschap Tidore met Nieuw-Guinea dient te worden verbroken. De naam Papoea moet worden afgeschaft, amdat dit word het Tidoreesch slaaf beteeken. Het volk wenscht het land Nieuw-Guinea te noemen en het volk Irian*”. (S.L. van der Wal (ed.), 1946), dan nama yang di usulkan ialah Irian. Pengusulan nama Irian ini oleh Frans Kaisepo memiliki tendensi politik. Frans Kaisepo adalah seorang pribumi asli Papua (dari Biak) diangkat Pemerintah Kolonial Belanda menjadi pegawai *binnenlandsch bestuur* (administrasi sipil Belanda), karena dianggap pro Belanda, maka dalam konferensi Malino ia di utus untuk menggantikan Silas Papare (Serui) yang memiliki sikap keras terhadap pemerintah Belanda. Dalam perkembangannya nama Irian inilah di era Pemerintahan Soekarno secara resmi di gunakan sejak 1 Mei 1963 dengan sebutan Irian Barat. Sepuluh tahun kemudian tepatnya 1 Maret tahun 1973 nama ini kemudian diganti menjadi Irian Jaya pada era pemerintahan Soeharto. Memasuki era Reformasi penggunaan

nama Papua kembali di suarakan ketika masyarakat menuntut penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Pemintaan tersebut kemudian disetujui oleh Presiden Abdurahman Wahid dengan mengantikan nama Irian Jaya menjadi Papua pada tanggal 1 Januari 2000. Sebelum konferensi Malino di selenggarakan di Makasar, daerah Irian Jaya dinamakan daerah Papua. Nama Irian kemudian digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka propaganda politik melawan pemerintah colonial Belanda. Begitu banyaknya pergantian nama Papua, kemudian menjadi Irian dan menjadi Irian Jaya, dan kembali menjadi papua, maka untuk memudahkan penulis dalam membahas masalah ini, maka penulis menggunakan nama Papua sebagai entitas budaya dan politik.

Masalah Papua dalam Konferensi Malino dan Denpasar

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda termasuk Papua merupakan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi pihak Belanda menganggap Papua menjadi salah satu provinsi Kerajaan Belanda. Dalam usahanya untuk tetap menguasai Papua Gubernur Jenderal van Mook, mengusulkan kepada pemerintah Belanda di Den Haag agar kepadanya diberi izin mengadakan suatu konferensi pemimpin-pemimpin politik dari daerah-daerah yang tidak di kuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan restu yang diperoleh dari Pemerintah Belanda, maka van Mook menyelenggarakan konferensi Malino 16 Juli-24 1946.. Malino adalah sebuah tempat di Sulawesi Selatan yang terletak 70 km dari Makasar. Kata Malino (bahasa Bugis) “tempat yang damai”. Suatu tempat peristirahatan yang dulu ditahun 1932 dibangun oleh Gubernur J. Caron yang menjabat sebagai Gubernur Sulawesi. Konferensi Malino diadakan di Malino Sulawesi Selatan, daerah yang menghubungkan wilayah Timur Besar (Indonesia Timur) dengan Kalimantan dilihat dari sudut politis, ekonomis maupun geografis. Kota Makassar adalah pusat kehidupan ekonomis di wilayah bagian Timur Indonesia dan merupakan suatu bandar besar, sekaligus merupakan pusat lalu lintas samudera di bagian Timur Kepulauan Indonesia. Tujuan diadakannya Konferensi Malino adalah untuk mempertahankan eksistensi dan kepentingan pemerintahan kolonial Belanda dikawasan Timur Indonesia dengan wadah negara federal, sebagaimana diinginkan Van Mook. (Ide Anak Agung Gde Agung, 1985).

Konferensi Malino menurut Tarmidzy Thamrin merupakan awal diletakan dasar-dasar pemecahan wilayah Indonesia dalam daerah-daerah berdiri sendiri sebagai negara bagian dari suatu negara federal dan memberikan kemungkinan kepada pihak Belanda untuk memisahkan daerah Papua dari Indonesia. Pada saat yang bersamaan pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan keputusan (Staatsblad, no. 69, 15 Juli 1946), bahwa seluruh daerah Papua dinyatakan sebagai suatu karesidenan tersendiri, dan diangkat J.P.K. van Eechoud sebagai residen pertama. Pembentukan karesidenan mandiri dan terlepas dari Karesiden Maluku sebagai strategi agar tetap menguasai Papua. 9 Tarmidzy Thamrin, 2001).

Sesuai kesepakatan Konferensi Malino bahwa Konferensi kedua (sebagai kelanjutannya) akan diadakan kurang lebih empat bulan di Denpasar. Konferensi Malino yang diikuti oleh 71 perwakilan dari seluruh daerah Indonesia Timur, kebanyakan diwakili oleh Raja ataupun Sultannya, yang kesemunya merupakan boneka Belanda. Jumlah utusan-utusan daerah yang dipilih oleh masing masing daerah ditetapkan oleh Letnan Gubernur

Jenderal yang terdiri dari 55 utusan daerah dan tambah 15 utusan dari golongan minoritas (Cina dan Timur Asing lainnya) sehingga berjumlah 71 orang peserta orang Indonesia dan 5 orang Belanda dalam konperensi Denpasar. Sementara dari pihak Papua sengaja tidak diundang Frans Kaisepo untuk mewakili penduduk pribumi. Hal ini dimaksudkan untuk memuluskan rencana pemerintah kolonial Belanda untuk memisahkan papua dari Indonesia tidak mendapat rintangan dari masyarakat Papua. (Adnan Amal. 2007).

Zainal Abidin Alting dan Penolakan Konperensi Denpasar

Satu hal yang menjadi permasalahan yang krusial dalam konferensi tersebut adalah mengenai rancangan perumusan pembentukan Negara Indonesia Timur adalah pemisahan Papua dari Negara Indonesia Timur yakni pasal 1 ayat 2 yang menyatakan “Daerah negara timur besar meliputi daerah *gewest* yang diadakan menurut *ordonnantie* tanggal 19 Pebruari 1936 (Staatsblad no. 68). *Besluit Gubernemen* tanggal 25 Mei 1938 no.28, (Staatsblad no. 264). Tetapi tentang daerah Karesidenan Nieuw Guinea kemudian akan diambil keputusan kemana daerah tersebut dimasukan”. Pasal 1 ayat 2 inilah kemudian menjadi perdebatan dan keberatan oleh Sultan Tidore Zainal Abidin atas pemisahan Irian Barat dari Negara Indonesia Timur. Penolakan yang sama juga dilakukan oleh wakil-wakil daerah lainnya seperti; I Goesti Bagoes Oka (Bali), E Katoppo (Minahasa), Nadjamoedin Daeng dan Tadjoeidin Noer dari Sulawesi Selatan. Dengan demikian, agar menghindari perdebatan yang panjang mengenai status Irian Barat dalam ketatanegaraan Indonesia Timur, Zainal Abidin mengusulkan pasal 15 ayat 13 bahwa “ Daerah Maluku Utara, terdiri dari daerah swapraja Ternate, Tidore dan Bacan yang bersama terikat sebagai suatu federasi termasuk Irian Barat sesudah kata Tidore”. Namun usul ini ditolak oleh peserta lainnya, dengan tidak disebut Irian Barat sebagai bagian dari wilayah Negara Indonesia Timur, memberi kesempatan pada pihak Belanda untuk menganggap daerah Irian Barat bagian dari daerah koloni barunya yang terpisah dari Indonesia. (L. Katoppo, 1987).

Walaupun sebagean besar para delegasi menolak pemisahan Papua dari Negara Indonesia Timur, namun akhirnya mereka dapat menyetujui hasil persetujuan Konperensi Meja Bundar dan naskah Rencana Undang Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat. Memang banyak pertanyaan diajukan Zainal Abidin kepada pemerintah Belanda mengenai pokok dan hakekat persetujuan yang telah dicapai itu, dan pemerintah diminta memberi penjelasan. (Koran *Indonesia Timoer*, 1947).

Kendatipun hampir semua anggota meyakini penyosalannya bahwa masalah Irian Barat masih merupakan suatu sengketa namun para anggota dapat meyakini bahwa Delegasi Negara Indonesia Timur sudah berjuang secara maksimal untuk menghindarkan terpisahnya wilayah Irian Barat dari penyerahan kedaulatan dan oleh karena perkembangan keadaan tidak berhasil dalam perjuangan itu.

Oleh karena tidak dimasukan Papua dalam rumusan batas wilayah mengenai masalah Irian Barat, maka Zainal A. Alting tidak dapat menyetujui Piagam Penyerahan Kedaulatan. Dengan demikian hanya seorang anggota dari Maluku Utara Zainal A. Alting (Sultan Tidore) tidak dapat menerima terpisahnya Irian Barat dari wilayah Republik Indonesia Serikat dan menolak rumusan kompromi mengenai masalah itu sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 piagam penyerahan kedaulatan. Zainal A. Alting menyatakan bahwa dari dahulu kala wilayah Irian Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesultanan Tidore dan oleh karena itu swapraja ini mempunyai hak sepenuhnya dan syah

terhadap wilayah Irian Barat. Menurut pendapatnya jika kemudian diadakan penyelesaian mengenai masalah sengketa Irian Barat ini, hak syah Kesultanan Tidore sebagai dimaksudkan di depan harus diakui.

Pada tanggal 28 November 1949 Perdana Menteri Anak Agung menyampaikan jawaban atas pemerintah mengenai Papua di hadapan para anggota parlemen NIT dalam hubungan ini Anak Agung mengemukakan bahwa:

”Pendirian Delegasi Negara Indonesia Timur dalam Konperensi Meja Bundar tentang hal ini sama sekali sesuai dengan pendirian pemerintah yang saya anggap sudah cukup diketahui. Juga bagaimana delegasi dengan segala kekuatan mencoba mendapatkan hasil yang lain, yaitu agar Irian Barat pada penyerahan kedaulatan menjadi bagian Republik Indonesia Serikat. Maka pemerintah sangat menyesal bahwa hasil yang diinginkan itu tidak dapat dicapai dan bahwa masalah Irian Barat masih harus menjadi pokok sengketa dengan Negeri Belanda. Untuk menjawab pertanyaan Sultan Tidore tentang kedudukan Irian Barat di kemudian hari, pada dewasa ini masih *prematuur* (terlalu dini) untuk membahasnya dalam hubungan pembicaraan mengenai hasil-hasil Konperensi Meja Bundar. Tentunya yang menjadi soal ialah, apakah Irian Barat pada waktu penyerahan kedaulatan itu akan masuk menjadi bagian Republik Indonesia Serikat atau tidak. Dan Delegasi Negara Indonesia Timur pada permusyawaratan Konperensi Meja Bundar telah memperjuangkan hal ini sampai terakhir serta tetap mempunyai pendirian, bahwa kesatuan Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Daripada soal Irian Barat tetap menjadi suatu perselisihan dan sengketa, maka ini harus disesalkan, oleh karena perselisihan yang sedemikian dapat dan mungkin akan mengurangi perasaan persahabatan dan kerja sama antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia Serikat dalam rangka Piagam Uni. (Ide Anak Agung Gde Agung, 1978).

Dengan jawaban pemerintah tersebut sudah jelas bahwa tindakan pertama yang harus dilakukan ialah berusaha agar Irian Barat tetap menjadi bagian Republik Indonesia Serikat. Sehingga diharapkan kelak kedudukan Irian Barat dalam wadah Negara Republik Indonesia Serikat akan diatur dan merupakan keputusan dan tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia Serikat.

Dalam hal ini tentunya Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan berhubungan dengan segala golongan yang bersangkutan serta mempelajari terlebih dahulu dengan teliti perkembangan ketatanegaraan NIT. Sehingga tujuan pemerintah Negara Indonesia Timur adalah mendorong secepat mungkin akan menyelesaikan kasus Papua sesuai dengan kehendak seluruh bangsa Indonesia. (Imam Toto K. Rahardjo (ed), 1992).

Mengenai masalah Irian Barat yang telah mendapat pengesahan dalam Konperensi Meja Bundar. Maka dalam konferensi Denpasar ini anggota parlemen membahas untuk memasukan naskah tersebut ke rencana Undang Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat. Pada kesempatan itu Zainal A. Alting (Sultan Tidore) mengajukan permohonan agar diberi kesempatan untuk mengajukan penjelasan tentang sikapnya (*stern motiuering*) mengenai tidak dimasukkannya Papua dalam KMB. Sebagaimana di beritakan koran Negara Baru. Zainal A. Alting menyampaikan kekecewaannya sebagai berikut:

”Paduka Tuan Ketua yang Utama,

Saya selaku Kepala Kerajaan Tidore dengan banyak penyesalan tidak dapat menyetujui hasil-hasil Konperensi Meja Bundar karena dengan hasil tersebut

kerajaan saya, walaupun untuk sementara waktu telah dipisahkan, yaitu satu bagian masuk dalam lingkungan Republik Indonesia Serikat dan lain bagian ialah Irian Barat termasuk di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda. Pada akhirnya saya kemukakan, bahwa dalam keterangan yang pendek ini, dapat diambil kesimpulan, bahwa Kerajaan Tidore tetap mempertahankan haknya atas bagian Irian yang menurut sejarah termasuk dalam lingkungan kerajaan Tidore. Sekianlah. Terima kasih". (Koran, *Negara Baroe*.1947)

Pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk memisahkan Papua dari wilayah Indonesia Timur, mendapat protes keras oleh utusan Maluku Utara Zainal Abidin Alting (Sultan Tidore). Zainal Abidin menyatakan bahwa dari dahulu kala wilayah Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesultanan Tidore dan oleh karena itu swapraja ini mempunyai hak sepenuhnya dan syah terhadap wilayah Papua. Di samping itu pemisahan Papua dari Negara Indonesia Timur, bertentangan dengan keputusan konferensi Malino, yang saat itu terimanya Irian oleh kolonial Belanda sebagai nama baru menggantikan Papua yang di usulkan Frans Kaisepo (mewakili Papua).

Mengenai pembahasan hasil persetujuan Konperensi Meja Bundar dan Rencana Undang Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat, maka dilangsungkan pemungutan suara untuk mensyahkan Undang Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat. Pemungutan suara di lakukan sebanyak 50 anggota senat. Dari 50 peserta 49 orang memberi suara setuju dan satu suara tidak setuju, yaitu anggota Zainal A. Alting. Dengan ini dinyatakan oleh ketua parlemen bahwa naskah tersebut diatas disetujui oleh parlemen.

Dengan pernyataan ketua bahwa Badan Perwakilan Sementara Negara Indonesia Timur telah menyetujui naskah tersebut sehingga dengan ini persetujuan-persetujuan Konperensi Meja Bundar dan Undang Undang Dasar Sementara Republik Indonesia sudah disyahkan. Dengan diterimanya hasil KMB oleh anggota senat NIT, maka berakhir pulalah perjuangan dan harapan Zainal Abidin memperjuangan Papua kedalam kewadah Negara Indonesia Timur. (Koran, *Indonesia Timoer*, 1947).

Penolakan atas pemisahan Papua dari Negara Indonesia Timur bukan hanya berasal dari Zainal Abidin Alting. Sebagaimana di beritakan surat kabar Indonesia Timoer bahwa Raja-raja Papua seperti raja Ahmad-Uswanas, (Fak-Fak) dan Haji Ibrahim Baeo, (Rumbati/Kokas) telah majukan surat permohonan kepada Paduka Yang Mulia Menteri Dalam Negeri dari Negara Indonesia Timur, supaya Papua digabung di dalam Negara Indonesia Timur. Dalam surat permohonan itu kedua raja tersebut mengatakan bahwa:

"Kami telah mengakui pembentukan Negara Indonesia Serikat, yang terdiri dari Sabang sampai ke pulau Aru, dan sebagai putra bangsa kami hendak mencari perhubungan dan pertolongan dari pemerintah Negara Indonesia Serikat umumnya dan Negara Indonesia Timur khususnya, untuk member bantuan yang seluas-luasnya kepada kami, agar dengan segera kami dapat bertemu kembali dengan saudara-saudara setanah air. Meskipun dalam pembentukan Negara Indonesia Serikat menurut Perjanjian Linggarjati, pada tanggal 15 November 1946, dengan mengecualikan Papua, akan tetapi kami selalu tetap menghendaki dengan segala pikiran dan tenaga untuk bersatu padu dengan saudara-saudara sebangsa dalam Negara Indonesia Serikat. Maksud kami ini keluar dari lubuk hati yang bening dan

bersih oleh karena itu besarlah harapan kami agar Paduka Yang menerima persaudaraan kepada kami dan dari sana kita berdiri bersama-sama membangun satu Indonesia yang makmur dan mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya dikemudian hari”. (Koran, *Indonesia Timoer*, 1948).

Selain penolakan berasal dari raja-raja Papua, penolakan yang sama berasal dari rakyat Maluku. Hal ini sebagaimana diberitakan oleh surat kabar Soeara Ambon, bahwa dalam rapat raksasa yang diselenggarakan oleh Persatuan Pemuda Indonesia yang diadakan pada tanggal 13 November di kota Ambon dan dihadiri oleh lebih kurang 3000 orang telah mengambil resolusi sbb:

- a) Terus memperjuangkan cita-cita kemerdekaan tanah air Indonesia seluruhnya serta menyokong pemerintah NIT sesuai dengan putusan Dewan Maluku
- b) Menuntut, serta memperjuangkan Irian tetap dalam RIS. (Koran *Soeara Ambon*, 1947).

Rapat raksasa yang mengambil resolusi tersebut disokong oleh partai-partai dan organisasi-organisasi yang ada di Maluku, antara lain Partai Indonesia Merdeka, Partai Maluku Raya, gerakan Rakyat Nusa Ina, PARDAFI dari Maluku Selatan, perkumpulan kaum Buruh Maluku, Haven Arbeiders organisasi dan lain-lain. (Arnold Mononutu, 1981).

Hal yang sama juga dikemukakan Wakil Ketua Parlemen NIT, Arnold Mononutu bahwa masalah Papua harus diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia (Republik dan RIS), dan bagi NIT merupakan harga mati mengingat pembangunan negara di masa datang. Masalah Papua harus menjadi agenda utama dalam program kerja-kerja partai di parlemen NIT dan juga pemerintah NIT sendiri sehingga setahun dalam kepemimpinannya dapat diwujudkan. Dengan demikian mengenai masalah Papua terdapat kesepakatan antara tokoh-tokoh Federalis dan Republik sebagaimana dalam persetujuan KMB untuk mewujudkan kedaulatan RIS dan berharap antara Republik dan NIT akan terjadi kerjasama yang erat dalam usaha pembebasan Irian. (Koran *Soeloeh Rakyat*, 1949).

Pada akhir Konferensi Denpasar 24 Desember 1946, terbentuklah negara baru yang dinamakan Negara Indonesia Timur dalam wadah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) meliputi wilayah Sulawesi, Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara) dan Kepulauan Maluku. Negara Indonesia Timur terbagi menjadi 13 daerah otonomi: yaitu; Daerah Sulawesi Selatan, Daerah Minahassa, Daerah Kepulauan Sangihe dan Talaud, Daerah Sulawesi Utara, Daerah Sulawesi Tengah, Daerah Bali, Daerah Lombok, Daerah Sumbawa, Daerah Flores, Daerah Sumba, Daerah Timor dan kepulauan, Daerah Maluku Selatan dan Daerah Maluku Utara. Menurut hasil Konferensi Denpasar, wilayah Negara Indonesia Timur meliputi Karesidenan berikut, seperti termaktub dalam Staatsblad 1938 nomor 68 jo Staatsblad nomor 264, kecuali Irian Barat, yang akan ditetapkan kemudian hari. Karesidenan Sulawesi Selatan, Karesidenan Sulawesi Utara, Karesidenan Bali, Karesidenan Lombok dan Karesidenan Maluku. (Herry RD.Nachrawy, 2003).

Zainal Abidin Alting Gubernur Pertama Papua

Setelah bubarnya Negara Indonesia Serikat (RIS), Zainal Abidin Alting diundang oleh pihak Belanda kepadanya ditawarkan tiga opsi yaitu; (1) Papua bersama Tidore menjadi negara merdeka. (2). Papua bersama Tidore berdaulat di bawah Kerajaan Belanda, dan (3).

Papua bersama Tidore menyatu dengan NKRI. Dari ketiga opsi tersebut Zainal Abidin Alting memilih opsi ketiga, dengan sikap politik itulah dikemudian hari Presiden Soekarno mengangkatnya sebagai Gubernur Papua ada tahun 1965-1961, dan Soa-Sio Tidore sebagai ibukotanya. (IrzaArnitaDjafaar, 2005).

Presiden Soekarno kemudian meminta residen Zainal Abidin (1951-1957) yang juga adalah sultan Tidore untuk dapat membantu pemerintah pusat untuk mengklaim Papua adalah bagian dari Tidore dalam pespektif sejarah. Usulan tersebut disambut baik oleh Zainal Abidin dengan menawarkan soa-sio Tidore sebagai ibukota provinsi perjuangan Irian Barat.

Pada tanggal 17 Agustus 1956 Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukota Soasiu Tidore, dengan gubernur pertamanya Zainal Abidin Alting yang dilantik pada 23 September 1956. Zainal Abidin Syah menjadi gubernur Papua pertama 1956-1961, dan selama periode tersebut salah satu kebijakan Presiden Soekarno adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua dengan Indonesia. Maka pada 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan Trikora (tiga komando rakyat) yang terdiri atas; (1), gagalkan pembentukan Negara boneka Papua buatan Kolonial Belanda, (2) Kibarkan sang saka di seluruh Irian Barat, dan (3), bersiaplah untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan kesatuan tanah air Indonesia. (Sutrisno Kutoyo, 1978).

Kesimpulan

Pada akhirnya apa yang di perjuang Zainal Abidin dalam memperjuangkan pembebasan Irian Barat bukan hanya semata-mata motivasi politik dan historis melainkan sebagai tanggungjawab seorang pemimpin untuk berjuang membebaskan rakyatnya (Papua) yang dibelenggu oleh penjajah Belanda.

Sebagai sebuah realitas sejarah Zainal Abidin Alting memiliki peran besar untuk mendukung perjuangan pembebasan Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi. Pepera mempunyai arti yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia, karena merupakan bukti bahwa pemerintah Indonesia dalam merebut Irian Barat tidak melalui konfrontasi atau tindakan aneksasi/penjajahan kepada bangsa lain melainkan mendapat dukungan dari masyarakat Irian Barat.

Sebagai sebuah realitas sejarah, Zainal Abidin Alting memiliki peran besar untuk mendukung perjuangan pembebasan Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi. Dengan demikian menerima Papua dalam negara kesatuan RI secara otomatis, harus menerima Zainal Abidin Alting sebagai “Pahlawan Pembebasan Papua” atau dengan kata lain ”menghilangkan Zainal Abidin Alting dalam sejarah pembebasan Papua sama halnya tidak mengakui Negara Kesatuan RI” Semoga seluruh elemen bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku Utara tidak melupakan jasa dan peran Sultan Tidore Zainal Abidin Alting dan dijadikannya sebagai inspirator teladan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat.

Daftar Pustaka

- A.B. Lopian, 1980. Dalam pengantar *Memorie van Overgave J.H. Tobias (1857)-Memorie van Overgave C. Bosscher Residen Ternate (1859)*, Jakarta: ANRI.
- Abdul Hamid Hasan. 2000. *Aroma Sejarah dan Budaya Ternate*. Jakarta: PustakaUtama.
- Adnan Amal. 2007. *Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250– 1950*. Jakarta: Gora Pustaka Indonesia.
- Arnold Mononutu, 1981.*Potret Seorang Patriot*, Jakarta: GunungAgung,.
- Arthur A. Schillers, 1989. *The Formation of Federal Indonesia 1945-1949*. Bandung.
- Audrey Kahin, 1990. *Pergolakan Daerah Padaawal Kemerdekaan*.Jakarta: Grafiti.
- Chasan Bousoiri, *Sekulimit Derita Satu Edisi Kehidupan Seorang Dokter*, Jakarta: tanpaTahun.
- F.S.A. de Clercq, 2007. *Ternate:Karesidenan dan Kesultanan.Terjemahan Noer Fitriyanti dari,Bijdragen tot de kennis der Residentie Ternate, 1890. Ternate: Komunitas Uma Sania.*
- Herry RD.Nachrawy, 2003. *Peranan Ternate Tidore Dalam PembebasanIrian Barat. Ternate, YayasanKieRaha.*
- Wawan H. Purwanto, *Papua 100 Tahun ke Depan*, Jakarta: CMB Press, 2010.
- Ide Anak Agung Gde Agung, 1985. *Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta: GadjahMada.
- Indonesia Timoer: Makasar, 24Januari. 28 Pebruari. 24 Mei.22 Juni.18 dan 22 Desember 1948.
- IrzaArnitaDjafaar, 2005. *Dari Moloku Kie Raha Ke Negara Federal: Biografi Sultan Iskandar Muhammad Jabir Syah*. Jakarta: Bio Pustaka.
- L. Katoppo, 1972.*Perdjoangan Irian Kembali ke Dalam Wilayah RI*. Bandung: KilatMadju.
- Leonard Y. Andaya, 1993.*The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Marwati Djoened Poesponegoro NugrogoNatosusanto, et.al, 2008. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.

Menara Merdeka, Ternate: 12 Desember 1946

MuridanWidjojo, 2009. *The Revolt of Prince Nuku: Cross Cultural Alliance Making in Maluku, c. 1780-1810*. Leiden: Boston.

Negara Baroe: Makasar 13 Pebruari, 4 Maret. 23 Juni ,13dan 14 Mei 7 Juli 1947

Soeloeh Rakyat Makasar 13 Januari, 19 Pebruari, 18 dan 23 Maret, 30 Mei, 20 dan 25 Juni, 25 dan 30 Juli, 16 dan 25 Agustus, 19 September, 22 Oktober. 10, dan 22 November, 3 dan 26 Desember 1949.

Sutrisno Kutoyo, 1978. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Maluku*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

S.L. van der Wal (ed.), *Officiele Bescheiden Betreffende de Nederlands Indonesische Betrekkingen 1945-1950*, deel 5, 16 Juli-28 Oktober 1946.

Tarmidzy Thamrin, *Boven Digoel Lambang Perlawanan Terhadap Kolonialisme*. Surabaya: Cottage, 2001.